

Determinan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Berdasarkan *Global Reporting Initiative*

Determinants of Sustainability Report Disclosure Based on the Global Reporting Initiative

Indah Shofiyah

Program Studi Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan,
indah.shofiyah@act.uad.ac.id

Info Artikel

Diterima , 25 Januari 2021

Direvisi, 9 Juni 2021

Dipublikasi, 15 Juni 2021

Kata Kunci:

*Laporan berkelanjutan,
lverage, profitabilitas,
likuiditas, ukuran
perusahaan, umur
perusahaan, jenis auditor*

Keywords :

*Human resources,
financial statements,
Department of Housing
and Residential Areas of
Magelang City*

Abstrak

Perusahaan dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, namun tingkat pelaporan berkelanjutan di Indonesia masih sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengungkapan laporan berkelanjutan, beberapa variable independen yang dipilih adalah *lverage*, likuiditas, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan auditor. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan berkelanjutan perusahaan manufaktur dan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019, data yang berhasil olah sebanyak 75 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lverage*, likuiditas, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan berkelanjutan, sementara profitabilitas, ukuran perusahaan dan audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan.

Abstract

Companies are required to participate in realizing sustainable development, however the level of sustainability reporting in Indonesia is still very low. The purpose of this study is to examine the factors that influence the disclosure of sustainable reports. Some of the independent variables selected are *leverage*, liquidity, profitability, company age, company size and auditors. This study uses secondary data from the sustainability reports of manufacturing and mining companies listed on the IDX for 2017-2019, with 75 data processed successfully. The results showed that *leverage*, liquidity, and company age had no effect on sustainable disclosure, while profitability, firm size

and audit had an effect on sustainability report disclosure.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Meningkatnya kekhawatiran akan pemanasan global dan ketimpangan ekonomi telah menimbulkan pertanyaan tentang kontribusi organisasi bisnis modern terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial dunia (Zanten dan Tulder, 2018). Organisasi dituntut untuk memenuhi beragam kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang berbeda (Pope dan Lim, 2019; Siddiqui dan Uddin, 2016) menggapai tuntutan pemangku kepentingan, organisasi bisnis menggunakan laporan keberlanjutan yang meliputi informasi mengenai kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Higgins dan Coffey, 2016). Laporan keberlanjutan membantu organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memberikan citra positif di masyarakat (Pope dan Lim, 2019).

Laporan keberlanjutan memberikan berbagai informasi kepada pemangku kepentingan sehingga mereka dapat menilai kegiatan ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan (Orazalin dan Mahmood, 2018). Dengan kata lain, laporan berkelanjutan merupakan salah satu media utama bagi manajer untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kegiatan keberlanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, laporan berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etika mereka terhadap lingkungan dan masyarakat di mana mereka beroperasi dan untuk mengelola risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan (Orazalin, 2019). Biasanya, investor mengevaluasi strategi dan risiko bisnis, tanggapan pelanggan tentang kualitas produk dan layanan, dan karyawan ingin bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitas keberlanjutan mereka (Belal dan Owen, 2007). Semua kebutuhan dan ekspektasi ini telah menyebabkan peningkatan pengungkapan berkelanjutan (Orazalin dan Mahmood, 2018).

Tidak seperti laporan lingkungan dan CSR yang dilaporkan sebelumnya, laporan keberlanjutan biasanya disiapkan sesuai dengan kerangka pelaporan

yang dikenal luas dan berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah salah satu sistem pelaporan keberlanjutan yang diterima secara luas dan diakui di dunia (Dissanayake *et al.*, 2019 ; Pope dan Lim, 2019 ; Wachira *et al.* , 2019). Ini memberikan seperangkat elemen umum pelaporan berkelanjutan (Watts, 2015) yang membantu organisasi menyajikan laporan keberlanjutan dengan keseragaman dan komparabilitas yang lebih baik. Di sebagian besar negara berkembang, penerapan praktik pelaporan berkelanjutan masih bersifat sukarela dan organisasi bisnis belum memahami pentingnya praktik pelaporan tersebut (Aboud dan Diab , 2018). Namun, penerapan praktik pelaporan standar tersebut dalam konteks ekonomi dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan (Agyei dan Yankey, 2019; Kiliç *et al.*, 2016). Mempertimbangkan manfaat dari laporan berkelanjutan banyak organisasi di negara berkembang mulai mempersiapkan dan menyebarkan laporan keberlanjutan secara berkala, yang membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif (Md Zaini *et al.*, 2018). Besarnya factor pendorong untuk melakukan pengungkapan berkelanjutan yang akan menjadikan laporan tersebut sebagai kewajiban di masa depan (Pope dan Lim, 2019), penelitian tentang pelaporan berbasis GRI diperlukan untuk mengidentifikasi arah masa depan praktik pengungkapan berkelanjutan di negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini menginvestigasi determinan yang mendorong sebuah perusahaan melakukan pengungkapan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan variasi dalam penerapan praktik pelaporan standar di antara berbagai negara (Boolaky *et al.* , 2018 ; Piñeiro-Chousa *et al.* , 2019) dan menemukan bahwa penerapan praktik pelaporan yang berbeda sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. (Agyei dan Yankey , 2019 ; Aribi *et al.* , 2018 ; Bose *et al.* , 2018 ; Hessayri dan Saihi , 2018 ; Phiri *et al.* , 2019). Namun, studi empiris yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan berkelanjutan serta variasi praktik pengungkapan berkelanjutan di negara berkembang cukup terbatas (Boolaky *et al.* , 2018 ; Kuzey dan Uyar , 2017 ; Md Zaini *et al.* , 2018 ; Orazalin dan Mahmood , 2018). Organisasi bisnis di negara berkembang masih belum menyadari kebutuhan serta permintaan untuk praktik pengungkapan berkelanjutan secara sukarela meskipun penerapan praktik

pelaporan sukarela tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu (Agyei dan Yankey , 2019 ; Beck *et al.* , 2018 ; Mukherjee dan Nuñez , 2019). Selain itu, tidak mungkin untuk menggeneralisasi hasil penelitian dari negara maju ke pasar negara berkembang karena perbedaan masyarakat sipil, pengembangan kebijakan, kerangka peraturan, sistem kelembagaan dan harapan pemangku kepentingan (Belal dan Owen, 2015 ; Kuzey dan Uyar , 2017 ; Uddin *et al.* , 2017). Selain itu, faktor yang mendasari laporan berkelanjutan di pasar negara berkembang mungkin tidak sama dengan yang ada di negara maju (Boolaky *et al.* , 2018 ; Piñeiro-Chousa *et al.* , 2019 ; Uddin *et al.* , 2018). Dengan demikian penelitian ini menguji faktor pengungkapan sukarela di negara berkembang.

Mengingat kurangnya pengetahuan tentang praktik pelaporan perusahaan di pasar negara berkembang, terutama di wilayah Asia, penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan pengungkapan berkelanjutan perusahaan di negara berkembang, yaitu Indonesia. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi pada literatur. Pertama, untuk memberikan gambaran mengenai determinan pengungkapan laporan berkelanjutan, studi ini menganalisis dan mengukur indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial laporan berkelanjutan berdasarkan pedoman GRI. Hasil penelitian akan mendorong manajer untuk mengadopsi pedoman GRI dalam praktik pelaporan dan fokus pada faktor-faktor tertentu untuk meningkatkan kualitas dan akseptabilitas laporan berkelanjutan dalam konteks negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas literatur yang ada dalam konteks pasar berkembang dengan memeriksa sejauh mana dan determinan pengungkapan keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan publik di Indonesia dengan menggunakan kerangka kerja GRI.

2. Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Global Reporting Initiative (GRI) dan Praktik Pelaporan berkelanjutan

Pengungkapan berkelanjutan semakin mendapat perhatian di dunia bisnis, format dan alat pelaporannya telah berkembang dari waktu ke waktu dengan beragam tuntutan dari pemangku kepentingan yang berbeda (Pope dan Lim, 2019). Di antara kerangka kerja dan alat yang berbeda, kerangka GRI dianggap sebagai mekanisme yang paling dapat diterima secara luas untuk

praktik pengungkapan berkelanjutan mengingat adopsi, kelengkapan, prestise dan visibilitasnya di seluruh dunia (Dissanayake *et al.*, 2019; Kuzey dan Uyar, 2017; Siew, 2015; Simmons *et al.*, 2018). Meskipun pedoman GRI bukan persyaratan pengungkapan wajib, pedoman tersebut meningkatkan praktik pengungkapan berkelanjutan perusahaan secara substansial (Lock dan Seele, 2016; Venturelli *et al.*, 2019) dengan memberikan penilaian terintegrasi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dari kinerja keberlanjutan (Maas *et al.*, 2016; Yadava dan Sinha, 2016). kerangka kerja GRI membantu manajer memberikan informasi yang dapat diterima secara global dan relatif komprehensif tentang kinerja keberlanjutan (Dissanayake *et al.*, 2019; Fonseca *et al.*, 2012). Selain itu, penggunaan pedoman GRI untuk menilai pengungkapan keberlanjutan perusahaan memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih besar (Lu dan Abeysekera, 2017; Yadava dan Sinha, 2016).

Teori keagenan

Dalam konteks masalah asimetri informasi yang tersebar luas di ekonomi transisi, kebutuhan dan prinsip penelitian dapat ditelusuri ke esensi teori keagenan, teori legitimasi dan teori pensinyalan organisasi bisnis. Seperti yang dikemukakan oleh Cormier *et al.* (2005) dan Simmons *et al.* (2018), praktik pengungkapan berkelanjutan adalah fenomena yang kompleks, oleh karena itu, tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori tunggal. Dengan demikian, sesuai dengan studi sebelumnya (Kuzey dan Uyar, 2017; Matuszak *et al.*, 2019; Orazalin dan Mahmood, 2018; Reverte, 2009; Ruhnke dan Gabriel, 2013), studi ini menggunakan pendekatan multi-teori untuk menyelidiki sejauh mana dan faktor penentu pengungkapan kinerja keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan public di Indonesia

Teori keagenan mendalilkan bahwa manajer harus mengungkapkan semua informasi relevan yang tersedia untuk pemangku kepentingan karena principal tidak dapat mengawasi semua kegiatan rutin perusahaan (Fama dan Jensen, 1983; Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini sering kali menyebabkan principal menghadapi masalah yang merugikan karena mereka tidak selalu mengetahui agen yang lebih baik serta biaya agensi. Untuk mengatasi masalah informasi tersembunyi seperti itu, termasuk bahaya moral, perusahaan harus

meningkatkan transparansi melalui kebijakan pengungkapan perusahaan dan mengembangkan mekanisme insentif yang mendorong agen untuk mengungkapkan informasi dan pengetahuan tersembunyi mereka (Spence, 1973). Dalam hal ini, laporan keberlanjutan, yang disiapkan sesuai dengan kerangka GRI, memainkan peran penting dalam mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan (Kuzey dan Uyar , 2017 ; Orazalin dan Mahmood , 2018 ; Ruhnke dan Gabriel, 2013).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa organisasi bisnis adalah institusi yang dibangun secara sosial dan bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki ekspektasi implisit dan eksplisit tertentu dari perusahaan (DiMaggio dan Powell, 1991 ; Meyer dan Rowan, 1977). Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan harapan semua partisipan dalam masyarakat secara umum, bukan hanya hak investor. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat dapat mengakibatkan sanksi berupa pembatasan dan menghambat operasi bisnis, sumber daya ekonomi, dan permintaan produk dan jasa. Teori legitimasi mempengaruhi kebijakan pengungkapan perusahaan, yang diperlukan oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan (Bradley, 2004). Perusahaan menerbitkan jumlah pengungkapan sukarela yang lebih besar untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan untuk kasus-kasus di mana pengungkapan wajib perusahaan tidak mencukupi (Cheung *et al.* , 2010). Dalam kaitan ini, pengungkapan berkelanjutan berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kegiatan bisnis, dan menunjukkan bahwa organisasi pelapor beroperasi dalam norma dan nilai yang dapat diterima masyarakat.

Teori Persinyalan

Teori pensinyalan menyarankan bahwa perusahaan secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi ekonomi, lingkungan dan sosial untuk mengkomunikasikan posisi superior mereka di pasar untuk mempromosikan kesan positif di antara para pemangku kepentingan (Crowther dan Aras, 2014 ; Kuzey dan Uyar , 2017 ; Orazalin dan Mahmood , 2018). Manajer membedakan diri mereka dari pelaku pasar lainnya dengan memberikan lebih banyak informasi dan menandakan karakteristik perusahaan tertentu yang

tersembunyi dari pemangku kepentingan (Spence, 1973). Dengan kata lain, dari perspektif teori persinyalan, perusahaan meningkatkan praktik pengungkapan perusahaan mereka untuk mengirimkan pesan kepada pemangku kepentingan yang berbeda tentang kinerja keberlanjutan mereka untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan (Ruhnke dan Gabriel, 2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada besaran SR menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan memiliki relevansi nilai dan informasi keberlanjutan berfungsi sebagai alat pemberi sinyal kepada pemangku kepentingan (Crowther dan Aras, 2014 ; Kuzey dan Uyar , 2017 ; Orazalin dan Mahmood , 2018).

Leverage dan pelaporan keberlanjutan

Dari perspektif teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa perusahaan yang berhutang memberikan pengungkapan yang lebih sukarela untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi biaya modal. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa perusahaan yang dibebani dengan tingkat hutang yang tinggi memiliki kewajiban kontrak yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan informasi pemberi pinjaman dan mengurangi asimetri informasi, dan oleh karena itu, menghasilkan lebih banyak pengungkapan terkait keberlanjutan (Aribi *et al.* , 2018) Namun, Brammer dan Pavelin (2008) menyimpulkan bahwa tingkat leverage yang rendah memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam aktivitas CSR, karena pemberi pinjaman memberikan tekanan yang lebih sedikit atas aktivitas manajer yang terkait dengan CSR. Namun demikian, hubungan antara risiko dan kinerja keberlanjutan tidak diteliti secara luas dalam studi sebelumnya (Kansal *et al.* , 2014). Dengan menggunakan data dari perusahaan Eropa, De Beelde dan Tuybens (2015) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki hutang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela. Demikian pula, Aribi *et al.* (2018) memberikan bukti bahwa perusahaan dengan leverage tinggi menyampaikan informasi yang lebih sukarela kepada investor di pasar negara berkembang Yordania. Barako *dkk.* (2006) menemukan hubungan positif antara leverage dan pengungkapan sukarela di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kenya. Oleh karena itu, berdasarkan esensi teori keagenan, bahwa perusahaan

dengan leverage tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak pengungkapan terkait keberlanjutan untuk mengurangi asimetri informasi. Dengan kata lain, perusahaan dengan utang yang lebih tinggi diharapkan memiliki praktik PK yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, hipotesis berikut dikembangkan

H1: Leverage secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan

Profitabilitas perusahaan dan pelaporan keberlanjutan

Profitabilitas adalah penentu signifikan dari pengungkapan sukarela karena perusahaan yang menguntungkan cenderung menerbitkan lebih banyak informasi keberlanjutan untuk melegitimasi operasi mereka. Sebagaimana dicatat oleh Waddock dan Graves (1997) dan Simnett *et al.* (2009), perusahaan yang menguntungkan memberikan informasi keberlanjutan yang lebih luas dan transparan untuk jaminan eksternal. Selain itu, perusahaan yang menguntungkan memiliki insentif yang lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pemangku kepentingan untuk mempromosikan kesan positif sebagai alat pemberi sinyal (Alsaed, 2006). Aksu dan Kosedag (2006) memberikan bukti bahwa profitabilitas perusahaan secara positif terkait dengan praktik transparansi dan pengungkapan. Berdasarkan teori signaling dan bukti penelitian yang ada tentang hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dan SR, diharapkan profitabilitas berhubungan positif dengan pengungkapan keberlanjutan. Secara khusus, diasumsikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi keberlanjutan berdasarkan tingkat penerapan GRI yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hipotesis berikut dikembangkan:

H2 : Profitabilitas secara positif terkait dengan kualitas pengungkapan keberlanjutan

Umur perusahaan dan pelaporan keberlanjutan

Umur perusahaan mungkin merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi sejauh mana praktik pelaporan berkelanjutan karena perusahaan yang lebih tua dan lebih mapan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi keberlanjutan karena pengalaman pelaporan yang lebih lama.

Khan *et al.* (2013) memberikan bukti bahwa usia perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan CSR. Mahmood dan Orazalin (2017) menemukan adanya hubungan positif antara umur perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan. Mnif Sellami *dkk.* (2019) melaporkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif pada jaminan informasi keberlanjutan dalam kasus Prancis. Penelitian lain juga mengkonfirmasi hubungan positif antara usia perusahaan dan SR (misalnya Cormier *et al.* , 2005 ; Orazalin dan Mahmood , 2018). Berdasarkan perspektif teori legitimasi, diasumsikan bahwa perusahaan yang lebih tua dan lebih mapan akan menghasilkan lebih banyak informasi keberlanjutan karena mereka telah menetapkan legitimasi kepada pemangku kepentingan dan mengelola sistem pelaporannya. Dengan demikian, hipotesis berikut diajukan:

H3: Usia perusahaan secara positif berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan

Ukuran perusahaan dan pelaporan keberlanjutan

Studi sebelumnya tentang hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan keberlanjutan telah mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan adalah penentu signifikan yang mempengaruhi sifat SR karena perusahaan yang lebih besar lebih terlihat oleh pemangku kepentingan, sehingga memberikan informasi yang lebih sukarela untuk memenuhi pengawasan pemangku kepentingan yang lebih besar, seperti peraturan yang ketat dan perhatian media yang tinggi (Dissanayake *et al.* , 2016). Entitas yang lebih besar yang terkena lebih banyak tekanan sosial mengungkapkan informasi yang lebih sukarela untuk menunjukkan kewarganegaraan perusahaan mereka, sehingga melegitimasi aktivitas mereka (Matuszak *et al.* , 2019). Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya keuangan daripada yang kecil, dan oleh karena itu, biaya pengungkapan informasi sukarela menurun untuk perusahaan besar karena skala ekonomi (Ho dan Taylor, 2007 ; Matuszak *et al.* , 2019). Dalam konteks teori legitimasi, banyak dari studi ini memberikan bukti bahwa perusahaan besar menghadapi pengawasan pemangku kepentingan yang lebih besar dan tekanan eksternal yang lebih besar mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menghindari kemungkinan

kerugian karena tidak sah. Berdasarkan teori legitimasi dan temuan literatur sebelumnya, kami mengandaikan bahwa perusahaan besar mengungkapkan tingkat pengungkapan kinerja keberlanjutan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan

H4: Ukuran perusahaan secara positif berpengaruh pengungkapan

Likuiditas dan pelaporan berkelanjutan

Likuiditas adalah rasio yang dihitung dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kondisi keuangan yang tinggi dapat ditunjukkan dari tingkat likuiditas suatu perusahaan. Kredibilitas perusahaan ditunjukkan kepada orang luar ketika tingkat likuiditas tinggi dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Kamil dan Herusetya, 2012) [22]. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, kekuatan perusahaan dapat diketahui melalui rasio likuiditas yang tinggi dan dikaitkan dengan tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan yang tinggi. Hal ini didasarkan pada semakin tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan akan menyebabkan perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih luas daripada perusahaan yang memiliki likuiditas rendah (Lucia dan Pangabean, 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gantyowati dan Agustine (2017) serta Nasution, dkk. (2018) menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan..

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H5: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Sampel dan pengumpulan data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan tambang yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) untu periode tahun 2017-2019. Sampel yang diteliti adalah perusahaan yang melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan periode tahun 2017-2019.

Perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel terbatas pada jenis

tertentu dari subjek yang dapat memberikan informasi yang diinginkan dan merupakan satu-satunya yang memiliki atau sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016) [19].

Kriteria sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor manufaktur dan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
2. Mempublikasikan laporan keberlanjutan (laporan berkelanjutan) yang terpisah dari *annual report* secara berturut-turut pada tahun 2017-2019
3. Mempublikasikan laporan keberlanjutan (laporan berkelanjutan) yang terpisah dari *annual report* secara berturut-turut pada tahun 2017-2019 sesuai dengan standar.
4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Pengukuran variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini meliputi dimensi ekonomi, lingkungan dan social, dan indeks laporan berkelanjutan secara keseluruhan.

Variabel laporan berkelanjutan diukur dengan Laporan berkelanjutan *Disclosure Index* (SRDI) dengan menggunakan indikator dari *Global Reporting Initiative* (GRI) versi 4.0. Adapun indikator GRI yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi (*Economy*), sebanyak 9 indikator,
2. Lingkungan (*Environment*), sebanyak 34 indikator,
3. Sosial (*Social*), sebanyak 48 indikator, yang terdiri dari sub-sub indikator sebagai berikut:
 - (i) Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, sebanyak 16 indikator.
 - (ii) Hak asasi manusia, sebanyak 12 indikator
 - (iii) Masyarakat, sebanyak 11 indikator
 - (iv) Tanggung jawab atas produk, sebanyak 9 indikator

Jadi, total indikator GRI yang diukur adalah sebanyak 91 indikator.

Teknik yang digunakan dalam melakukan input data-adalah *content analysis*. Teknik ini merupakan pengkodefikasian teks yang mempunyai ciri-ciri yang akan ditulis dalam berbagai kelompok. Jika perusahaan mengungkapkan suatu

item maka akan diberi nilai 1, sedangkan jika perusahaan tidak mengungkapkan suatu item maka akan diberi nilai 0 (Lucia dan.Pangabean, 2018).

Pengukuran variabel independen

Kami memilih variabel penjelas berdasarkan literatur pengungkapan sukarela sebelumnya untuk menjelaskan kemungkinan penentu dalam penyebaran informasi keberlanjutan. Secara khusus, kami memasukkan variabel independen, *leverage*, *likuiditas*, *profitabilitas*, usia perusahaan, ukuran perusahaan dan jenis auditor.

Tabel 1. Definisi Operasional dan pengukuran Variabel

Variabel	Akronim	Operasionalisasi
<i>Variabel dependen</i>		
Performa ekonomi (%)	ECON	Masing-masing dari 9 indikator yang terkait dengan kinerja ekonomi mengambil nilai 1 jika informasi berbasis GRI yang sesuai dilaporkan, sebaliknya 0. Dengan demikian, total indeks ekonomi berkisar antara 0 dan 9, dan dihitung dalam persentase
Kinerja lingkungan (%)	ENVI	Masing-masing dari 30 indikator yang terkait dengan kinerja lingkungan mengambil nilai 1 jika informasi berbasis GRI yang sesuai dilaporkan, jika tidak 0. Jadi, indeks lingkungan total berkisar antara 0 dan 30, dan dihitung dalam persentase
Kinerja sosial (%)	SOCI	Masing-masing dari 40 indikator yang terkait dengan kinerja sosial mengambil nilai 1 jika informasi berbasis GRI yang sesuai dilaporkan, jika tidak 0. Jadi, total indeks sosial berkisar antara 0 dan 40, dan dihitung dalam persentase
Indeks pelaporan keberlanjutan (%)	SPIND	SPIND dihitung sebagai jumlah total indikator yang diterima dari ketiga dimensi SR dibagi dengan jumlah indikator yang disajikan dalam GRI. Dengan demikian, skor keberlanjutan total berkisar antara 0 dan 79, dan dihitung dalam persentase

Variabel	Akronim	Operasionalisasi
<i>Variabel independen</i>		
Leverage	LEV	Total hutang dibagi dengan total ekuitas
Likuiditas	FCF	Arus kas dibagi dengan total aset
Profitabilitas	ROE	Penghasilan bersih dibagi dengan ekuitas total
Usia perusahaan	AGE	Jumlah tahun sejak pendirian entitas
Ukuran perusahaan	SIZE	Logaritma dari total aset
Jenis auditor	AUDIT	Mengambil nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh big four, jika tidak 0

Analisis regresi

Penelitian ini menggunakan data panel, maka menggunakan model regresi panel untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati dari waktu ke waktu dan di seluruh perusahaan. Secara khusus, model regresi berikut digunakan untuk memperkirakan ketergantungan faktor pendorong pengungkapan keberlanjutan pada variabel SR:

$$SPIND_{it} = \alpha + \beta 1 (LEV) + \beta 2 (ROE) + \beta 3 (AGE) + \beta 4 (SIZE) + \beta 5 (AUDIT) + \beta 6 (FCF)\eta_i + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Melaporkan Statistik Deskriptif Tentang Praktik SR Dari Perusahaan Menurut Industri.

	Frek.	Persen	ECON	ENVI	SOCI	SPIND
Perusahaan	(N)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Tambang	30	26,6	16.67	9.62	8.46	9.83
Manufaktur	45	73.40	25.03	9.49	10.64	11.29
Total	75	100.00	18.49	8.48	9.05	9.88

Tabel 3. Menyajikan Statistik Deskriptif Rinci Tentang Praktik Pengungkapan Berkelanjutan Untuk Tahun 2017-2019.

Variabel	Obs	Mean	SD	Min.	Max.
ECON	75	18.49	12.55	1.27	67.68
ENVI	75	8.48	12.48	0,00	80.00
SOCI	75	9.05	8.84	1.27	47.51
SPIND	75	9.88	9.40	1.27	51.89
<i>Variabel dikotomi</i>		<i>Ya (1)</i>	<i>Tidak (0)</i>		
SAREP (%)	75	10.28	89.74		
SRLNG (%)	75	33.55	66.45		

Nilai rata-rata untuk indikator ekonomi, lingkungan dan sosial SR masing-masing adalah 18,49, 8,48 dan 9,05 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak memberikan informasi tentang aspek ekonomi keberlanjutan. Bukti ini serupa dengan temuan Yadava dan Sinha (2016) bahwa pelaporan kinerja ekonomi lebih komprehensif dan lebih baik dibandingkan dengan pelaporan indikator kinerja lingkungan dan social. Indeks laporan berkelanjutan rata-rata adalah 9,88 persen dan bervariasi antara 1,27 dan 51,89 persen, dengan standar deviasi 9,40 persen.

Tabel 4. Statistik deskriptif variabel independen.

Variabel	Obs	Mean	SD	Min.	Max.
LEV	75	2.02	3.67	0.10	33.64
FCF	75	9.26	16.78	- 79.17	80.79
ROE	75	12.58	6.26	1.00	26.00
AGE	75	12.39	2.01	7.90	17.73
SIZE	75	1.871.246	7.162.200	2.694	49.682.417
AUDIT (%)	75	78.22	21.78		

Nilai rata-rata ROE sebesar 12,58 persen dengan standar deviasi 6,26 persen. Hasil AUDIT menunjukkan bahwa 78,22 persen perusahaan diaudit oleh KAP Big 4. Ukuran perusahaan rata-rata adalah 1,87 miliar dan berkisar antara 2,69 juta dan 49,68 miliar hasil untuk tampilan AGE bahwa usia rata-rata perusahaan Indonesia adalah sekitar 13 tahun dan bervariasi antara 1 dan 26 tahun.

Tabel 5. Korelasi Pearson Di Antara Semua Variabel Untuk Tahun 2017-2019.

	SPIND	ROE	LEV	FCF	USIA	UKURAN	AUDIT
SPIND	1						
ROE	0,078	1					
LEV	- 0,128	0,219 **	1				
FCF	0,063	0,458 **	- 0.105	1			
USIA	- 0,024	- 0,028	- 0.151	0.117	1		
UKURAN	0,517 **	0.132	- 0,184 *	0,262 **	0,088	1	
AUDIT	0,374 **	0,168 *	- 0,069	0,253 **	0,255 **	0,529 **	1

Korelasi antar variabel independen menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas karena koefisien estimasi relatif rendah. Sebagaimana jelaskan oleh Pallant (2007) , multikolinieritas muncul hanya jika koefisien korelasi antara variabel penjelas melebihi 0,700. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 , tidak ada koefisien korelasi antara variabel independen yang melebihi nilai ambang batas maksimum, yang menunjukkan

tidak adanya masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 6. Estimasi Regresi

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ECON	ENVI	SOCI	SPIND
LEV	0,129 (0,80)	- 0,216 * (- 1,87)	- 0,0953 (- 1,53)	- 0,171 ** (- 1,97)
FCF	0,00389 (0,09)	- 0,0207 (- 0,50)	- 0,00562 (- 0,28)	- 0,00477 (- 0,15)
ROE	0,0577 ** (2,48)	0,0624 ** (2,34)	0,0288 ** (2,36)	0,0501 ** (2,86)
AGE	0,214 (1,06)	- 0,275 * (- 1,74)	0,00646 (0,06)	- 0,126 (- 1,27)
SIZE	0,821 (1,32)	0,873 * (1,60)	0,753 * (1,86)	0,569 * (1,95)
AUDIT	3.465 * (1.77)	2.408 (1.39)	1,612 (1,19)	2,613 * (1,88)
Konstan	- 4.232 (- 0.66)	- 8.015 (- 1.38)	- 7.363 (- 1.60) *	- 4,707 (- 1,44)
<i>n</i>	146	146	146	146
Wald χ^2	65,21 ***	53,59 ***	64,86 ***	135,28 ***
R^2 (%)	45.18	46.69	57.42	64.87

Melaporkan estimasi regresi random effect dari model SR dengan ECON (Model 1) sebagai ukuran pengungkapan ekonomi, ENVI (Model 2) sebagai ukuran pengungkapan lingkungan, SOCI (Model 3) sebagai ukuran pengungkapan sosial, dan SPIND sebagai ukuran pengungkapan keberlanjutan secara keseluruhan. Estimasi koefisien LEV negatif dan tidak mendukung hipotesis penelitian ini mengenai dampak positif leverage pada laporan berkelanjutan.

Secara khusus, variabel LEV secara negatif dikaitkan dengan ENVI dan SPIND pada tingkat signifikansi 10 dan 5 persen. Temuan ini mendukung bukti yang diberikan oleh Branco *et al.* (2014) dan Sierra *et al.* (2013) bahwa perusahaan dengan leverage tinggi enggan memberikan lebih banyak informasi keberlanjutan. Salah satu penjelasan yang mungkin atas kurangnya hubungan positif adalah bahwa kreditor dan pemberi pinjaman kurang memperhatikan pentingnya laporan berkelanjutan (Liu dan Anbumozhi, 2009). Faktor lain yang mungkin menjelaskan hubungan yang lemah antara leverage dan pengungkapan keberlanjutan adalah bahwa perusahaan dengan leverage tinggi lebih fokus pada tujuan jangka pendek daripada strategi jangka panjang (Kuzey dan Uyar, 2017).

Koefisien likuiditas yang dilaporkan menunjukkan bahwa kapasitas

keuangan tidak menjelaskan variasi dalam peringkat kinerja keberlanjutan. Hasil ini tidak mendukung teori persinyalan, dan oleh karena itu, tidak konsisten dengan anggapan bahwa kapasitas keuangan mengarah pada penyebaran laporan berkelanjutan yang lebih baik. Jadi, *H2* tidak didukung. Temuan ini menegaskan temuan Artiach *et al.* (2010) dan Kuzey dan Uyar (2017) bahwa kapasitas keuangan tidak berpengaruh terhadap penyebaran informasi keberlanjutan.

Variabel ROE yang mewakili profitabilitas berhubungan positif dengan semua variabel laporan berkelanjutan termasuk ECON, ENVI, SOCI dan SPIND pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan memberikan informasi yang lebih transparan dan rinci kepada pemangku kepentingan tentang keberlanjutan, dan dengan demikian menunjukkan tingkat praktik pengungkapan berkelanjutan yang lebih tinggi secara umum. Dengan demikian, temuan ini mendukung *H3* dalam konteks teori persinyalan. Secara keseluruhan, hasil ini sejalan dengan temuan Kansal *et al.* (2014), yang menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara pengungkapan keberlanjutan dan profitabilitas. Hubungan positif dapat dijelaskan oleh fakta bahwa perusahaan yang menguntungkan menyebarkan lebih banyak informasi tentang kinerja keberlanjutan untuk mempromosikan citra perusahaan yang kuat dan kesan positif di antara para pemangku. Koefisien estimasi AGE berhubungan negatif dengan ENVI pada tingkat signifikansi 10 persen. Namun, AGE tidak terkait dengan variabel pengungkapan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa usia perusahaan tidak berdampak pada kinerja keberlanjutan perusahaan

Berkenaan dengan ukuran perusahaan, variabel SIZE berhubungan positif dengan ENVI, SOCI dan SPIND pada tingkat signifikansi 10 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan besar mengungkapkan informasi yang lebih transparan dan luas tentang dimensi lingkungan dan sosial SR. Oleh karena itu, *H4* terdukung. Bukti empiris ini sejalan dengan temuan Dissanayake *et al.* (2016), Kuzey dan Uyar (2017), bahwa perusahaan besar memberikan informasi keberlanjutan yang lebih tinggi.

Koefisien yang dilaporkan menunjukkan bahwa AUDIT berhubungan

positif dengan ECON dan SPIND pada tingkat signifikansi 10 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Big Four mengungkapkan informasi yang lebih luas tentang kinerja ekonomi dan melaporkan pengungkapan keberlanjutan berkualitas lebih tinggi secara umum. Hubungan positif antara pengungkapan keberlanjutan dan jenis auditor ini serupa dengan yang dilaporkan oleh Haniffa dan Cooke (2002) dan Orazalin dan Mahmood (2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini memiliki beberapa implikasi praktis yang penting bagi pembuat kebijakan, regulator, praktisi, investor, dan organisasi bisnis. Temuan menunjukkan bahwa pembuat kebijakan dan regulator untuk mempromosikan penerapan pedoman GRI, merumuskan praktik pengungkapan perusahaan untuk organisasi bisnis, dan meningkatkan budaya pengungkapan secara keseluruhan. Karena pengungkapan keberlanjutan berkontribusi pada efisiensi pasar modal (Kuzey dan Uyar, 2017). Secara keseluruhan, temuan ini mendukung gagasan bahwa pembuat kebijakan dan regulator harus mempertimbangkan penerapan pedoman GRI yang diakui secara global untuk pertumbuhan jangka panjang dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Domingues *et al.*, 2017). Hasil empiris juga menunjukkan bahwa manajer yang ingin mempromosikan citra perusahaan dan menyampaikan citra positif di antara para pemangku kepentingan harus fokus pada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tingkat dan sifat praktik pengungkapan keberlanjutan. Secara khusus, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan dan tipe auditor dapat menjadi faktor penting dalam penyebaran pengungkapan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboud, A. and Diab, A. (2018), "The impact of social, environmental and corporate governance disclosures on firm value: evidence from Egypt", *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 8 No. 4, pp. 442-458.
- Agyei, S.K. and Yankey, B. (2019), "Environmental reporting practices and performance of timber firms in Ghana: perceptions of practitioners", *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 9 No. 2, pp. 268-286.

- Aksu, M. and Kosedag, A. (2006), “Transparency and disclosure scores and their determinants in the Istanbul Stock Exchange”, *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 14 No. 4, pp. 277-296.
- Ali, W., Frynas, J.G. and Mahmood, Z. (2017), “Determinants of corporate social responsibility (CSR) disclosure in developed and developing countries: a literature review”, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Vol. 24 No. 4, pp. 273-294.
- Allegrini, M. and Greco, G. (2013), “Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian listed companies”, *Journal of Management and Governance*, Vol. 17 No. 1, pp. 187-216.
- Alsaeed, K. (2006), “The association between firm-specific characteristics and disclosure”, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 5, pp. 476-496.
- Beck, C., Frost, G. and Jones, S. (2018), “CSR disclosure and financial performance revisited: a crosscountry analysis”, *Australian Journal of Management*, Vol. 43 No. 4, pp. 517-537.
- Belal, A.R. and Owen, D.L. (2007), “The views of corporate managers on the current state of, and future prospects for, social reporting in Bangladesh: an engagement-based study”, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 20 No. 3, pp. 472-494.
- Bose, S., Khan, H.Z., Rashid, A. and Islam, S. (2018), “What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective”, *Asia Pacific Journal of Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 501-527.
- Bowrin, A.R. (2018), “Human resources disclosures by African and Caribbean companies”, *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 8 No. 2, pp. 244-278.
- Bradley, N. (2004), “Corporate governance scoring and the link between corporate governance and performance indicators: in search of the Holy Grail”, *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 12 No. 1, pp. 8-10.
- Brammer, S. and Pavelin, S. (2008), “Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure”, *Business Strategy and the Environment*, Vol. 17 No. 2, pp. 120-136.
- Coffie, W., Aboagye-Otchere, F. and Musah, A. (2018), “Corporate social responsibility disclosures (CSR), corporate governance and the degree of multinational activities: evidence from a developing economy”, *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 8 No. 1, pp. 106-123.
- Cormier, D., Magnan, M. and Van Velthoven, B. (2005), “Environmental disclosure quality in large German companies: economic incentives, public pressures or institutional conditions?”, *European Accounting Review*, Vol. 14 No. 1, pp. 3-39.
- Deegan, C.M. (2014), *Financial Accounting Theory*, McGraw-Hill Education, North Ryde.

DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1991), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, University of Chicago Press, Chicago, IL, available at: <https://doi.org/10.2307/258726>

Dissanayake, D., Tilt, C. and Qian, W. (2019), “Factors influencing sustainability reporting by Sri Lankan companies”, *Pacific Accounting Review*, Vol. 31 No. 1, pp. 84-109.